



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

2025



**LAPORAN EVALUASI CAMAT
TRIWULAN I**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan 22 (dua puluh dua) yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepl daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Camat pada Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu:

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
4. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Kecamatan;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;

13. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
14. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
15. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
16. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperjanjikan 2 Sasaran 6 program, Adapun 6 program sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program penunjang urusan pemerinthan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar (%)	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Miilik Daerah Penunjang Urusan	100%

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2,477,854,150	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6,403,000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 72,758,500	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19,984,500	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18,845,000	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 13,149,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 2,608,994,150	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Camat melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan.

Tabel 2.3

Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2025 Camat

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR	100%	1,159,055,624	100%	723,600,636	100%	242,561,940	100%	617,445,100
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)	100%	6,940,000	100%	7,570,000	100%	10,172,500	100%	10,310,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,500,000	1 Dok	4,668,000	1 Dok	4,215,000		3,000,000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	1 Dok	2,779,500	1 Dok	2,534,000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1,985,500	-	-	-	-	1 dok	1,874,000

	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	3,454,500	2 Dok	2,902,000	2 Dok	3,178,000	2 Dok	2,902,000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	737,401,050	100%	555,766,250	100%	372,319,550	100%	191,040,450
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya terbayarkan	15	732,628,800	15	549,471,600	15	366,314,400	15	183,157,200
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	3	5,031,450	3	5,778,450	3	6,305,950	3	7,428,450
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	2,678,000	100%	3,171,000	100%	3,469,000	100%	4,121,000
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun	3	2,678,000	3	3,171,000	3	3,469,000	3	4,121,000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17,510,500	100%	13,739,000	100%	1,542,000	100%	1,405,000
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	1,842,500	3	1,405,000	3	1,542,000	3	1,405,000
	Bimbingan Teknis implemetasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	15,668,000	1	12,334,000				

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	67,067,500	100%	47,080,500	100%	50,778,500	100%	30,927,500
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	1,464,000	10	497,000	10	6,090,000	10	497,000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	3,514,500	20	1,530,500	20	2,160,500	20	1,465,500
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	1,470,000	12	1,470,000	12	1,470,000	12	1,470,000
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	3	37,360,000	3	19,560,000	3	26,520,000	3	13,800,000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	18,699,000	3	19,463,000	3	15,459,000	3	9,135,000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	59,558,350	100 %	73,738,500	100 %	78,472,500	100 %	92,818,500

-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	4,544,850	3	3,795,000	3	4,379,000	3	3,795,000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	12,703,500	3	12,703,500	3	12,703,500	3	12,703,500
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	4,150,000			1	4,150,000		
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	38,160,000	3	57,240,000	3	57,240,000	3	76,320,000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	100	16,258,000	100	10,400,000	100	7,890,000	100	4,120,000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	14,928,000	7	3,110,000	7	4,710,000	7	2,790,000
-	Pemeliharaan Mabel	Jumlah Mebel yang dipelihara			2	860,000				
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	1,330,000	9	6,430,000	6	3,180,000	2	1,330,000

02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DN PELAYANAN PUBLIK	100%	1,377,500	100%	1,000,000	100%	594,500	100%	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkn kepada Camat	Persentase Urusan pemerintahan yang dilimpahkn kepada camat yang dilaksanakan	100%	1,377,500	100%	1,000,000	100%	594,500	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di laksanakan	1	1,377,500	1	1,000,000	1	594,500	3	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA DAN KELURAHAN	100%	41.139.000	100%	16.682.500	100%	22.270.000	100%	32,685,500
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	41.139.000	100%	16.682.500	100%	22.270.000	100%	32,685,500
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	10.893.500	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	30.245.500	3	16.628.500	3	22.270.000	3	32,685,500

04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	6.394.000	100	4.915.000	100	2.915.000	100	2.500.000
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	5.325.000	100%	4.625.000	100%	2.640.000	100%	2.500.000
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.378.000	1 Laporan	3.025.000	1 Laporan	970.000	1 Laporan	900.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.947.000	1 Laporan	1.600.000	1 Laporan	1.670.000	1 Laporan	1.600.000
	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	1.069.000	100%	290.000	100%	275.000	100%	
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	1	1.069.000	1	290.000	1	275.000	1	
05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	100	4.483.500	100	6.000.000	100	6.087.500	100	6.000.000

		PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN								
	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	4.483.500	100	6.000.000	100	6.087.500	100	6.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	3	4.483.500	3	6.000.000	3	6.087.500	3	6.000.000
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	100	8.742.750	100	2.498.250	100	2.700.250	100	4,586,750
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	8.742.750	100	2.498.250	100	2.700.250	100	4,586,750
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	5.969.000					14	2,088,500
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	7	2.773.750	7	2.498.250	7	2.700.250	7	2,498,250

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Camat

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota ini memiliki 7 Kegiatan dan 22 sub Kegiatan, dengan target yang ditetapkan yaitu 100% realisasi 92% sehingga capaian kerjanya yaitu 92%.

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	92	92	Sangat baik
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerahh</i>	100	100	100	Sangat baik
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-
	- Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-
	- Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	100	Sangat baik
	- Evaluasi kinerja perangkat daera	4	4	100	Sangat baik
Jumlah		200			
Rata-rata capaian		100%			
2.	<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100	93	93	Sangat baik

	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15	13	86,86	Sangat baik
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	3	3	100	Sangat baik
Jumlah		186,86			
Rata- Capaian		93%			
3.	<i>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	100	100	100	Sangat baik
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3	3	100	Sangat baik
Jumlah		100			
Rata-rata capaian		100			
4.	<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100	50	50	Kurang
	- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	3	3	100	Sangat baik
	- Bimbingan teknis implemementasi peraturan perundang-undangan	2	-	-	
Jumlah		50			
Rata-rata capaian		50			
5.	<i>Administrsi umum perangkat daerah</i>	100	100	100	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	10	100	Sangat baik
	- Penyediaan bahan logistik kantor	20	20	100	Sangat baik

	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	4	100	Sangat baik
	- Penyediaan bahan bacaan peraturan prundang-undangan	3	3	100	Sangat baik
	- Fasilitasi kunjungan tamu	3	3	100	Sangat baik
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	3	100	Sangat baik
Jumlah		600			
Rata-rata capaian		100%			
6	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	100	100	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	3	3	100	
	- Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	100	
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	1	1	100	
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3	3	100	
Jumlah		400			
Rata-rata capaian		100%			
7.	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	100	100	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7	7	100	
	- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	2	2	100	
	- Pemeliharaan Mebel				
Jumlah		200			
Jumlah rata-rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah 91,85% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Kinerja program ini tidak mencapai 100% pada Sub Kegiatan BIMTEK tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya undangan pelaksanaan BIMTEK pada Triwulan I dan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan ditargetkan 15 orang namun terealisasi 13 orang sehingga mempengaruhi capaian Kinerja.

Alternative Solusi yang dilakukan:

- Akan di optimalkan pada Triwulan selanjutnya.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan target triwulan I yaitu 3 Dokumen dan terelisasi 3 Dokumen sehingga capaiannya 100%. Dokumen yang terealisasi pada sub kegiatan ini yakni 3 Dokumen yaitu Dokumen Perizinan Non Usaha yang disusun setiap bulan yang didalamnya meliputi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan permintaan jumlah laporan penduduk, pendataan rekapitulasi dan mutasi kependudukan, pelayanan rekomendasi, dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintahan kecamatan, pemantauan dan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal kebersihan wilayah.

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat:	100	100	100	
	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	3	3	100	Sangat Baik
Jumlah		3	3	100	
Jumlah rata-rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Tersusunnya Dokumen Perizinan Non Usaha bulan Januari-Maret.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Target yang ditetapkan 100% dan capaian kerjanya sebesar 50%. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Target yang ditetapkan pada Triwulan I yaitu 5 Lembaga Kemasyarakatan dan terealisasi sebanyak 5 Lembaga Kemasyarakatan yang meliputi Karang Taruna,

Rukun Tetangga/Rukun Warga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pendmping Desa.

2. *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.*

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 3 Laporan dan realisasi 0 Laporan.

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Keluarahan	100	100	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	100%	Sangat Baik
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	0		
Jumlah		8	5	100	
Jumlah rata-rata		50%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah 50% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Pada Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa Target yang ditetapkan pada Triwulan I yaitu 5 Lembaga Kemasyarakatan dan terealisasi sebanyak 5 Lembaga Kemasyarakatan yang meliputi Karang Taruna, Rukun Tetangga/Rukun

Warga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pendamping.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tidak terealisasi dikarenakan belum melaksanakan kegiatan rapat rutin dan kegiatan PKK.

Alternative Solusi yang dilakukan:

- Akan di optimalkan pada Triwulan selanjutnya.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator program ini adalah persentase rata-rata kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut:

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	100	
	2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	100	
	Jumlah	2	2	200	
	Jumlah rata-rata	100			
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	
	1.Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	1	1	100	

	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
	Jumlah	1	1	100	
	Jumlah rata-rata	100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor pendukung keberhasilan:

1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan target sub kegiatan ini 1 Laporan yaitu:
 - ✚ Tersusunnya Laporan terkait pengamanan dan ketertiban pada saat menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 2025.
2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat target sub kegiatan ini 1 Laporan yaitu:
 - ✚ Tersusunnya Laporan terkait mengantisipasi keamanan dan ketertiban menjelang bulan Ramadhan (Puasa) tahun 2025.
3. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia target sub kegiatan ini 1 Laporan yaitu:
 - ✚ Tersusunnya Laporan Koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten terkait masalah Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Puasa.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut: Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100	100	100	Sangat Baik
	1.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	3	100	Sangat Baik
Jumlah		3	3	100	100%
Jumlah Rata-Rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor pendukung keberhasilan:

1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan target sub kegiatan ini 1 Laporan yaitu:

- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 22 Januari 2025 terkait meningkatkan Efektifitas dan

harmonisasi kerja forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcaam) tingkat kecamatan kalaena.

- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 28 Februari 2025 terkait rapat FORKOPIMCAM Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan menjelang Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M.
- ✚ Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 25 Maret 2024 terkait Rapat persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator program ini adalah Persentase Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Target yang ditetapkan 100% capaian Kinerjanya sebesar 50% dengan tabel capaian sebagai berikut:

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	Sangat Baik
	1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	7	7	100	Sangat Baik
	2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7	0	0	
Jumlah		14	7	50%	
Jumlah rata-rata		50%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah 50% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi

penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa target yang ditetapkan yaitu 7 Dokumen dan terealisasi 7 Dokumen Adapun Dokumen yang dihasilkan yaitu 7 Dokumen Asistensi APBDes Pokok yang meliputi Dokumen Asistensi Desa Kalaena Kiri, Desa Pertasi Kencana, Desa Mekar Sari, Desa Non Blok, Desa Sumber Agung, Desa Sumber Makmur, Desa Argomulyo.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Capaian kinerjanya tidak mencapai 100% dikarenakan pada sub kegiatan Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan tidak terlaksana dikarenakan belum adanya peraturan bupati terkait Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa.

Alternative Solusi yang dilakukan:

- Akan di Optimalkan pada Triwulan selanjutnya.

BAB IV
REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan pada Teknis dan Sekretariat disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2,477,854,150	907,672,600	370.103.288	40.77%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6,403,000	423,300	423,300	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72,758,500	25,244,500	10.777.000	42.69%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19,984,500	5,633,500	4.630.200	82.19%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18,845,000	3,724,000	2.124.000	57.03%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,149,000	6,087,750	4.540.000	74.57%
Jumlah		2,608,994,150	948,785,650	392.597.788	
Rata-rata Capaian Keuangan		41.37%			

BAB V PENUTUP

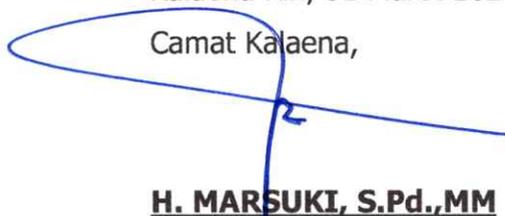
Capaian Realisasi Kinerja Dan Realisasi Keuangan dalam pelaksanaan program pada seksi dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
82%	41.37%

- Capaian Kinerja tidak mencapai 100% dikarenakan pada Sub Kegiatan BIMTEK tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya undangan pelaksanaan BIMTEK pada Triwulan I dan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan ditargetkan 15 orang namun terealisasi 13 orang sehingga mempengaruhi capaian Kinerja.
- Penyebab utama rendahnya capaian realisasi anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 yang mengakibatkan pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan.

Kalaena Kiri, 31 Maret 2025

Camat Kalaena,



H. MARSUKI, S.Pd.,MM

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. :19691025 199802 1 004

